(Tidak) Demokratis ala Asia

Review buku: **Clark D. Neher dan Ross Marlay, *Democracy and Development in Southeast Asia; The Winds of Change, Westview Press, Inc., Colorado, 1995.***

Oleh: *Eric Hiariej*[**]

Pendahuluan

The discussion about democracy generally comes to the perspective differences at the philoshopical level. Despite these differences, some political experts are quite optimistic on the future of democracy in many countries. This optimism lies on the fact that there has been a consensus to measure democracy at the practical level. Based on this background, Neher and Marlay use procedural democratic criterias to highlight the mozaic of democracy in Asian countries. Both fall to the conclusion that Asian democracy posseses a unique characteristic, which is called "asian-style democracy".

Secara ontologis ada macam-macam pandangan yang membenarkan keberadaan demokrasi. Seringkali bermacam pandangan ini bertolak belakang satu sama lain. Individualisme liberal dan sosialisme holistik, misalnya, mendukung demokrasi dengan alasan yang berbeda. Menurut individulaisme liberal, demokrasi harus ada untuk menjamin terwujudnya kepentingan setiap individu. Karena itu demokrasi adalah sebuah pemerintahan perwakilan yang mengedepankan persamaan dan hak pilih universal. Sedang menurut sosialisme holistik, demokrasi diperlukan untuk menjamin kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Di sini demokrasi adalah sistim ekonomi, dan juga politik, yang memungkinkan masyarakat menerapkan kontrol sosial tidak hanya atas wilayah politik, tapi yang terpenting terhadap produksi dan distribusi barang[1].

Untungnya perbedaan hanya berlangsung di tingkat filsafati. Pada level praktis, ontologi-ontologi teori di atas tidak terlalu berbeda ketika menunjuk institusi atau prosedur yang tergolong demokrasi. Sekalipun terdapat beberapa perdebatan kecil sekitar lembaga-lembaga mana saja yang harus ada, rata-rata pengamat dan ahli percaya terdapat sederetan prosedur

[1] Ontologi demokrasi sebagai sebuah teori sosial dijelaskan , diantaranya, oleh Carol C Gould yang berusaha menawarkan sebuah ontologi alternatif. Lihat Carol C Gould dalam *Rethinking Democracy; Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy and Society.*

atau model-model minimal yang berlaku universal. Pemungutan suara secara berkala, kompetisi antar kandidat, pertanggungjawaban eksekutif atau hak pilih universal bagi orang dewasa tampaknya telah diterima secara luas sebagai elemen-elemen utama yang harus tampil dalam sebuah rezim demokrasi. Dari pelbagai elemen yang disepakati ini, pemilihan umum lalu tampil sebagai elemen terpenting. Meminjam istilah Huntington, pemilu adalah *sine qua non* yang tak terelakkan bagi demokrasi.[2]

Kesepakatan di tingkat praktis tidak hanya memudahkan pengukuran tingkat demokrasi pada setiap negara, tetapi lebih jauh telah mendorong optimisme besar terhadap masa depan demokrasi. Bila menggunakan pemilu sebagai indikator utama, umpamanya, boleh dikata demokrasi telah berhasil menyapu sebagian besar negara di dunia. Huntington telah menegaskan itu dengan mengemukakan konsep gelombang demokratisasi, yang menurut tesisnya sudah melanda dunia sebanyak tiga kali. Atau beberapa waktu sebelumnya, hal yang serupa pernah dilakukan O'Donnell dan kawan-kawan lewat proyek "Transisi dari Pemerintahan Otoritarian: Prospek-Prospek bagi Demokrasi di Amerika Latin dan Eropa Selatan". Clark D Neher dan Ross Marlay dalam bukunya *Democracy and Development in Southeast Asia: The Winds of Change* juga melihat menguatnya prosedur-prosedur minimal bagi demokrasi di negara-negara Asia Tenggara sebagai angin perubahan yang menjanjikan ke arah sistim politik yang lebih demokratis.

Biasanya demokrasi Asia Tesis Neher dan Marlay sini didefinisikan sebagai metode politik. Pemahaman yang sangat prosedural ini berangkat dari tradisi teorisasi ala Schumpeterian, yang menganggap demokrasi sebagai mekanisme kelembagaan yang memungkinkan keterlibatan setiap individu atau masyarakat secara keseluruhan dalam proses pengambilan kebijakan. Tren yang sama kelihatan begitu jelas dalam tulisan Neher dan Marlay. Demokrasi, mengikuti kedua penulis ini, minimal mengandung tiga unsur berikut. Pertama, partisipasi setiap warga masyarakat dalam memilih penguasa; kedua, kompetisi antar kandidat yang akan dipilih; dan ketiga; pengakuan pemerintah terhadap kebebasan sipil dan politik.[3]

Neher dan Marlay kemudian menerapkan definisi ini untuk mengukur rekor demokrasi negara-negara Asia Tenggara. Caranya, ketiga karakteristik demokrasi di atas diuraikan ke dalam sejumlah indikator yang bisa diukur — lebih banyak secara kualitatif. Tingkat partisipasi masyarakat dihitung menurut hak suara, hak oposisi, pertanggungjawaban rezim

---

[2] Memahami demokrasi secara praktis seperti ini diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan besar, diantaranya, Huntington. Lihat Samuel P. Huntington dalam *The Third Wave. Democratization, Democratization in the Late Twentieth Century*, University of Oklahoma Press, Norman, 1991.

[3] Coba bandingkan definisi Neher dan Marlay dengan definisi Huntington. Menurut Huntington sistim politik di abad 20 dianggap demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif dipilih lewat pemilu yang bersih, setiap calon bebas bersaing untuk memperoleh pendukung, dan setiap orang dewasa berhak memberikan suara

terhadap masyarakat, independensi, pengaruh kelompok-kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan, dan tingkat partisipasi partai dalam proses politik. Tingkat kompetisi antar kandidat diukur berdasarkan aturan-aturan pemilu, keberagaman kandidat (calon atau kontestan), pengaruh dari parlemen terpilih, pengaruh dari eksekutif terpilih, dan jujur tidaknya sebuah pemilu. Sementara kebebasan sipil dan politik diukur menurut derajat kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan dari perilaku sewenang-wenang negara atau pihak ketiga. Indikator-indikator ini diberi nilai 1-4 dengan uruta-urutan; 1 = demokratis, 2 = semi demokratis, 3 = semi otoriter, dan 4 = otoriter. Hasil penilaian lalu dijumlah sendiri-sendiri menurut masing-masing karakteristik. Langkah terakhir adalah mencari rata-rata total penjumlahan nilai ketiga karakteristik. Nilai 3 sampai 4 tergolong demokrasi, 5 sampai 7 semi demokratis, 8 sampai 10 semi otoriter, dan 11 ke atas otoriter. Dengan cara seperti ini, selama 1994-1995, prestasi demokrasi negara-negara di Asia Tenggara sebagai berikut: Filipina 5, Thailand dan Malaysia 6 (ketiganya masuk kategori semi demokratis); Singapura 8, Indonesia 9 (tergolong semi otoriter); Laos 12, Vietnam 12, Burma 12 (otoriter). Pada saat pengamatan ini dilakukan Kamboja sedang dalam masa transisi.

Kedua penulis juga mengamati prestasi demokrasi negara-negara tersebut dalam kurun waktu yang lebih panjang. Sepanjang 1960-1995, rezim semi otoriter di Indonesia dan Singapura tidak pernah bergeming sejengkalpun. Begitupula Burma, Brunei dan Vietnam hampir tak pernah beranjak dari sistim otoriter. Malaysia memiliki prestasi terbaik sebagai negara semi demokratis, dengan sedikit interlude otoriter di akhir 60-an. Di Thailand dan Filipina rezim otoriter dan semi otoriter silih berganti dengan semi demokratis selama 35 tahun. Sedangkan Kamboja dan Laos bergantian antara otoriter dan semi otoriter.

Neher dan Marlay mencoba menemukan semacam pola, paling tidak, untuk mencari sebab-sebab demokratis-otoriternya suatu negara. Perhatian dipusatkan pada asumsi lama yang percaya ada hubungan positif antara demokrasi dan tingkat pembangunan ekonomi, semakin kaya sebuah negara semakin besar kemungkinan lahirnya sistim politik yang demokratis. Tetapi kesahihan korelasi positif ini perlu diragukan. Masalahnya Singapura yang memiliki rekor ekonomi menakjubkan justeru memiliki sistim politik yang semi otoriter. Faktor berikutnya yang diperhitungkan adalah agama, etnis dan budaya. Ada anggapan demokrasi hanya lahir pada budaya tertentu. Ungkapan-ungkapan seperti hanya budaya yang mendukung toleransi yang cocok bagi demokrasi atau pemisahan gereja dan negara memungkinkan lahirnya demokrasi mewakili anggapan ini. Faktor-faktor lainnya meliputi sejarah kolonialisme, kaitan dengan dengan dunia internasional, dan peran negara. Sepertinya, dalam banyak hal, kedua penulis cenderung memusatkan perhatian pada kaitan

antara demokrasi dan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan *Human Development Index* (HDI) yang dikeluarkan UNDP[4], skor pembangunan negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 1992 sebagai berikut: Singapura 43, Brunai 44, Thailand 54, Malaysia 57, Filipina 99, Indonesia 105,Vietnam 113, Burma 130, Laos 133, dan Kamboja 147. Daftar ini ternyata kurang relevan dengan ranking demokrasi, terutama pada kasus Singapura dan Brunai. Tapi mengikuti kedua penulis, meningkatnya jumlah warga terdidik telah memperkuat tuntutan ke arah keterbukaan politik. Demonstrasi pro-demokrasi di Thailand, *people power* di Filipina, atau makin gencarnya tuntutan pemerintahan yang bertanggungjawab di Indonesia sebagaian besar disponsori kelompok menengah yang jumlahnya kian membengkak setelah tiga dasawarsa pembangunan. Di pertengahan dekade 90-an ini semakin banyak kelompok bisnis, profesional dan intelektual yang menghendaki pembukaan batas-batas negara terhadap bantuan luar negeri, investasi dan informasi. Pengintegrasian ke arena kesejagatan membuat ide-ide liberal dari barat, termasuk demokrasi, dengan mudahnya hadir di ruang makan setiap warga di negara-negara Asia Tenggara. Artinya, walau bukan satu-satunya, tingkat pembangunan ekonomi merupakan faktor pendukung penting bagi demokratisasi.

Sebetulnya hal menarik yang muncul dari tulisan Neher dan Marlay adalah konsep *asian-style democracy*[5] (bab 2). Konsep ini digunakan untuk menegaskan perbedaan demokrasi di asia dengan demokrasi-demokrasi yang sudah lebih dulu ada di Eropa dan Amerika. Menurut keduanya *asian-style* democracy diperlukan karena rata-rata negara-negara Asia sedang menghadapi tiga masalah penting, yakni pembangunan ekonomi, keamanan nasional dan integrasi nasional. Dikhawatirkan bila demokrasi ala barat diterapkan sepenuhnya, ketiga masalah pelik itu tidak akan teratasi. *Asian-style democracy* juga dianut beberapa negara (semi) demokratis di Asia lainnya seperti Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan dan Sri Lanka. Secara garis besar Neher dan Marlay mengidentifikasi 6 unsur yang membedakan demokrasi Asia dengan Barat. Keenam unsur itu adalah konfusianisme, hubungan patron-klien, personalitas, otoritas, dominasi satu partai, dan negara yang kuat.

Konfusianisme berpengaruh besar terhadap kultur politik di Cina, Jepang, Korea, Vietnam dan Singapura. Prinsip-prinsip utamanya menekankan harmoni, stabilitas dan konsensus. Hirarki sangat diperhatikan, sementara kekuasaan atau wewenang yang dimiliki kalangan penguasa tidak pernah dipersoalkan. Tradisi Asia memandang kekuasaan merupakan pemberian "dewa-dewa". Karenanya bukan hal yang bijak mengkritik

---

[4] Indikator HDI meliputi tiga elemen utama, yakni tingkat harapan hidup, tingkat buta huruf, tingkat pendapatan berdasarkan akses pada sumber-sumber. Tampak jelas UNDP mengartikan pembangunan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi.

[5] *Asian-style democracy* sampai saat ini menjadi bahan perdebatan menarik. Sebagaian pengamat menganggap konsep ini tak lebih dari dalih elit penguasa untuk menghindar dari keterbukaan politik yang lebih luas

pemerintah.

Hubungan patron-klien inheren dalam politik di sebagaian besar negara di Asia. Interaksi antar individu dengan semangat egalitarian seperti yang berlangsung dalam demokrasi-demokrasi di Barat digantikan oleh hubungan berat sebelah antara patron dan klien. Berkenaan dengan itu, komunikasi politik sangat ditentukan oleh personalitas. Di sini politik berarti membuat kontak pribadi. Bahkan kontak pribadi — bisa karena hubungan darah, daerah, se-almamater, dst — menggantikan peran instiusi-institusi politik formal dalam penentuan kebijakan.

Rata-rata politik negara-negara Asia diwarnai oleh dominasi sebuah partai politik. Di India Partai Kongres, di Jepang LDP, di Malaysia UMNO, di Indonesia Golkar dan di Singapura PAP. Pada kasus yang ekstrim partai-partai dominan ini digunakan pemerintah untuk meraih legitimasi, lewat kemenangan besar-besaran dalam pemilu. Dekat dengan ini, negara-negara Asia tergolong negara-negara kuat. Maksudnya, negara memiliki kekuatan yang besar untuk mengkooptasi kelompok-kelompok non-negara seperti partai politik, perkumpulan bisnis, asosiasi pedagang, serikat buruh atau serikat petani. Negara juga berperan besar dalam pembangunan ekonomi. Baik sekedar membuat kebijakan-kebijakan yang menentukan arah perekonomian, maupun dalam bentuk investasi langsung dalam sebuah proyek. Kecenderungan negara yang kuat selalu dibenarkan dengan alasan demi suksesnya program pembangunan dan stabilitas nasional.

Beberapa Catatan

Topik utama tulisan Neher dan Marlay adalah demokrasi dan perubahan. Keduanya hendak mengamati wajah demokrasi (atau otoriter) negara-negara di Asia Tenggara, dengan menggunakan ukuran-ukuran demokrasi prosedural. Yang perlu diperhatikan, menurut Neher dan Marlay, demokrasi Asia mempunyai corak tersendiri, yang diistilahkan dengan *asian-style democracy*. Ada delapan bab (3-10) yang membahas secara spesifik masing-masing negara. Setiap bab menggambarkan perkembangan demokrasi (atau otoriter) masing-masing negara dan membanding-kannya dengan indikator-indikator pembangunan berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan perekonomian. Tujuannya untuk menelusuri kaitan antara demokrasi dan pembangunan. Secara keseluruhan kedua penulis boleh dibilang berhasil menggambarkan wajah demokrasi (atau otoriter) ala Asia dari setiap negara Asia Tenggara.

Dalam banyak hal konsep *asian-style democracy* yang dikemukakan kedua penulis merupakan kelatahan yang kerap menimpa pengamat dan ahli demokrasi akhir-akhir ini. Bermula dari transisi rezim otoriter yang terjadi di banyak tempat, tampil sejumlah rezim demokrasi baru di dunia yang berbeda dengan rezim-rezim demokrasi yang lebih tua di Eropa Barat dan Amerika Utara. Para pengamat dan ahli menanggapi perkembangan ini dengan dua cara. Sebagaian melakukan semacam *analytic differentiation* dengan maksud

mengklarifikasi variasi bentuk demokrasi yang sedang bermunculan di mana-mana. Sebagian lagi menerapkan *conceptual validity*[6]. Cara kedua ini berusaha mencari konsep demokrasi alternatif—tidak musti mengikuti model barat — yang lebih sesuai. Ini lalu mendorong lahirnya sejumlah *democracy "with adjectives"*, seperti *authoritarian democracy, neopatrimonial democracy, military-dominated democracy, proto democracy,* dan beragam demokrasi lainnya yang mengikutkan embel-embel didepan atau dibelakangnya. Konsep *asian-style democracy* termasuk dalam keranjang besar *democracy "with adjectives"*.

Maksud meng-*adjective*-kan demokrasi di suatu negara tentunya untuk kepentingan klarifikasi, bahwa negara bersangkutan memiliki karakter yang berbeda. Susahnya cara ini bisa menimbulkan bias dalam menilai atau mengukur demokratis tidaknya suatu rezim politik. Mengikuti *asian-style democracy* di atas, bagaimana bisa sebuah negara dinilai demokratis bila hubungan patron-klien dan personalitas masih kuat berakar dalam kultur politik. Parahnya lagi, sejumlah penguasa di Asia Tenggara beramai-ramai mengadopsi *democracy "with adjectives"* untuk menerapkan demokrasi, konon kabarnya, berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa. Kenyataanya demokrasi yang selalu serba dibedakan dengan demokrasi Barat itu justeru mempraktekan nilai-nilai dan perilaku yang jauh dari prinsip dasar demokrasi. Contohnya, atas nama stabilitas dan harmoni, seringkali oposisi atau kritik terhadap pemerintah tidak dibenarkan.

Barangkali kelatahan ini tidak perlu terjadi bila Neher dan Marlay, juga sebagian besar penulis lainnya, tidak ikut-ikutan menggunakan pengertian demokrasi yang prosedural. Pengertian seperti ini diakui memudahkan siapa saja untuk mengukur demokratis tidaknya suatu negara. Hanya tinggal menunjuk apakah ada pemilu yang bersih dan berkala, apakah ada partisipasi masyarakat, adakah kontestasi, atau apakah ada pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik. Namun pengertian yang prosedural inipun cenderung menimbulkan bias yang lain.

Demokrasi pada hakekatnya menghendaki kontrol masyarakat terhadap negara. Karena itu demokrasi tidak cukup hanya dengan keberadaan lembaga formal yang menjamin partisipasi, hak-hak dan kebebasan, serta kontestasi. Tapi demokrasi juga mengharuskan hadirnya sebuah masyarakat yang memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi kekuatan negara. Sebab, masyarakat yang kuat mampu mengawasi tindak tanduk negara. Prosedur-prosedur minimal demokrasi yang sudah dimiliki sebagian besar negara-negara Asia Tenggara selalu tidak mampu berfungsi optimal, lantaran terperangkap dalam interaksi negara masyarakat yang tidak seimbang. Kedua penulis ini sendiri mengakui negara-negara di Asia Tenggara tergolong *strong state*.

---

[6] Kedua istilah ini diambil dari tulisan David Collier dan Steven Levitsky, "Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research", dalam *World Politics* 48 (April 1997), 430-51

Lebih jauh lagi, demokrasi pada dasarnya lebih luas dari sekedar prosedur ataupun perimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat. Demokrasi itu juga nilai-nilai, semangat dan jiwa. Disini demokrasi berarti ada toleransi, ada kesediaan berkompromi, kompetisi, penghormatan terhadap aturan main, menghargai pendapat dan perbedaan orang lain, atau menerima pluralitas. Berdasarkan sejarah di sejumlah negara, demokrasi akan efektif di masyarakat yang paham arti penting, mau dan tahu cara menggunakan demokrasi untuk mewujudkan kepentingannya. Sayangnya pemahaman demokrasi yang satu ini kerap tertinggal.

Neher dan Marlay tampaknya hendak memberikan perhatian cukup besar pada hubungan pembangunan ekonomi dan demokrasi. Sayangnya, pembicaraan yang diketengahkan keduanya belum cukup tuntas. Tidak cukup jelas, apakah otoriterisme yang berjalinkelindan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara seperti Indonesia dan Singapura menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak berhubungan dengan demokrasi. Ataukah, menguatnya tuntutan ke arah keterbukaan politik yang gencar semenjak awal dekade 90-an yang dipakai untuk menunjukkan korelasi yang sebaliknya.

Boleh jadi, untuk kasus negara-negara di Asia Tenggara, hubungan antara pembangunan ekonomi dan demokrasi tidak mesti kausalistis. Jika mencermati tren ke arah keterbukaan di Indonesia, Thailand atau Singapura misalnya, mungkin bisa dibilang (keberhasilan) pembangunan ekonomi pada akhirnya akan mendorong ke arah demokrasi, **selama ada kondisi tertentu**. Kondisi itu diantaranya, munculnya kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan dengan demokrasi; menguatnya independensi masyarakat terhadap negara, katakanlah dengan tampilnya asosiasi, kelompok-kelompok fungsional dan profesi; dan meningkatnya desakan struktural terhadap negara untuk mengurangi keterlibatan ekonominya. Disini hubungan pembangunan ekonomi dan demokrasi sifatnya kondisional. Tapi ini baru sebuah hipotesa yang masih perlu diuji.

---

[1] Staf Pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol-UGM; Peneliti pada Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP), UGM, dan Peneliti pada Institute for Research and Empowerment (IRE),

Karakteristik dan Sumber Resiko Dalam Era Modernisasi Refleksif

Oleh : Suharko*

Abstract

Modernization has reached a level of social development, that is reflexive modernization, which distinct with simple modernization. Reflexive modernization has a higher level of risk or uncertainty, that is manufactured risk or uncertainty. The manufactured risk appears as a large-scale hazard, both in term of space or time. The risk tends to be refractory hazard and it is very difficult to control and manage. The sources of manufactured risk relate with the limitations of modern institutions, which arise in the forms: economic polarization, ecological threats, threats of large-scale war, and denial of democratic rights. According to Giddens, the solving of risk need to reform those problems by radical politics. ***

> *"...'how shall we live?' in a new guise - in a situation where the advance of science and technology, coupled to economic growth mechanisms, force us to confront moral problems which were once hidden in the naturalness of nature and tradition"* (Giddens, 1994: 206).

Pendahuluan

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) telah memainkan peranan besar dalam perkembangan peradaban manusia. Sebagaimana tampak dalam kehidupan sehari-hari, teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam setiap aktivitas manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan. Teknologi telah menjadi instrumen yang membebaskan manusia dari kekuatan alam. Ia menjadi alat manusia untuk mengatasi berbagai krisis yang melekat pada dirinya dalam hubungannya dengan lingkungan alam. Pada titik ini teknologi menjadi kekuatan emansipatoris.

* Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, dan staf pada *Institute for Research and Empowerment* (IRE) Yogyakarta.

Namun, teknologi kemudian berkembang tanpa dapat dikontrol lagi oleh manusia. Yang terjadi jusru sebaliknya, manusia dikontrol oleh teknologi. Peran emansipatoris yang semula dimiliki teknologi menghilang, dan teknologi berubah menjadi kekuatan yang dominatif terhadap manusia. Dickson (1974), dalam kritiknya terhadap dampak teknologi ini menyatakan bahwa teknologi telah bergerak di luar kontrol manusia, bahkan mengambil alih kontrol atas planet bumi dan meminta kepatuhan total manusia (jika manusia masih diberi peluang untuk hidup). Kepercayaan terhadap iptek, menurutnya, adalah sama halnya dengan membuat perjanjian dengan setan. Pada titik inilah, peranan teknologi berada pada titik kritis, yang kemudian melahirkan kontroversi mengenai dampak sosialnya. Perkembangan ini oleh Horkheimer dan Adorno (1972) disebut sebagai dialektika pencerahan, atau dalam bahasa Habermas (1990), disebut sebagai paradoks modernisasi.

Menurut Giddens (1996), manusia saat ini tidak hidup dalam dunia yang dikuasainya, melainkan sebaliknya, hidup dalam dunia yang lepas dari kontrolnya. Suatu dunia yang oleh Edmund Leach (1968) disebut sebagai *"runaway world"*. Yang menarik adalah bahwa segala sensasi hidup dalam dunia yang lepas kontrol ini tidak lagi disebabkan oleh kurangnya akumulasi pengetahuan. Bahkan, karakter lepas kontrol ini merupakan sesuatu yang melekat dalam akumulasi pengetahuan itu sendiri. Segala ketidakpastian (*uncertainty*) yang dialami manusia kini adalah bukan merupakan hasil dari kebodohan (*ignorance*) manusia, sebagaimana klaim para pemikir pencerahan. Segala ketidakpastian tersebut, dalam banyak hal, justru merupakan bagian dari intervensi manusia yang sudah terlalu jauh masuk ke dalam sejarah dan lingkungan dunia fisik.

Tulisan ini tidak ingin memasuki wacana mengenai kepentingan dan rasionalitas yang bekerja di balik kekuatan teknologi, yang kemudian menjadikannya sebagai ideologi. Kajian teori-teori kritis kiranya telah memberi pemahaman yang amat berharga dalam kaitan isu tersebut. Tulisan ini lebih berpretensi untuk mengkaji, dalam ungkapan Wilbur Ferry, potensi toxic (*toxic potentiality*) yang dimiliki oleh perkembangan teknologi saat ini. Potensi *toxic* ini bersumber dari sifat teknologi modern yang "lapar energi", sehingga berdampak pada krisis lingkungan atau ekologi yang makin akut dan menimbulkan resiko tersendiri bagi umat manusia. Dengan rumusan lain, apa yang ingin dikaji adalah resiko atau *"hazard"* yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi ketika ia bergerak menuju suatu *"point of no return"* dan memasuki era yang disebut dengan *"reflexive modernization"* (Beck, Gidden & Lash, 1994; Beck, 1993).

Menurut Beck (1993) dan Giddens (1996), pada era ini, perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki karakter resiko tersendiri, yang berbeda dari era sebelumnya. Karakter tersebut merupakan implikasi logis dari kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan elemen mendasar dari era modernisasi refleksif. Secara rinci, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang: bagaimanakah karakteristik dan sumber resiko dalam era sekarang, dan adakah peluang yang tersisa untuk secara teoritis mengatasi resiko tersebut? Namun sebelum penyajian sampai pada jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut akan

dipaparkan secara ringkas kekuatan-kekuatan dan mekanisme perubahan seperti apa yang bekerja dalam era modernisasi refleksif, sehingga menimbulkan resiko yang distingtif.

Modernisasi Refleksif (*Reflexive Modernization*)

Giddens membagi perkembangan modernisasi ke dalam dua periode yang distingtif, yakni periode modernisasi sederhana (*simple modernization*) dan modernisasi refleksif, atau disebut pula dengan masyarakat post-tradisional.[1] Apa yang membedakan periode modernisasi sederhana dari modernisasi refleksif terletak pada kondisi ketidakpastian. Kondisi ini sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan yang telah berlangsung lama dari tatanan industrial. Hanya saja kondisi ketidakpastian ini ditekan oleh dominannya modernisasi sederhana. Dalam modernisasi sederhana evolusi industrial tampak sebagai proses yang teramalkan, karena adanya kemajuan iptek. Karena itu, pertumbuhan industri memiliki alur yang jelas.

Modernisasi refleksif lebih dari itu, merespon perkembangan yang berbeda, yang kini tengah berlangsung, yakni globalisasi yang melanda dan mengubah kehidupan personal sampai global. Secara rinci, Giddens menyebut ada tiga rangkaian perubahan dasar yang dalam beberapa dekade terakhir, telah mengintensifkan transformasi kondisi ketidakmenentuan dan resiko. Tiga rangkaian perubahan utama yang memiliki akibat di seluruh negara-negara industri, dan sampai tingkat tertentu, mempengaruhi masyarakat global, adalah sebagai berikut.

Pertama, perubahan yang berkaitan dengan pengaruh dari globalisasi. Globalisasi tidak secara sederhana merujuk pada intensitas kompetisi ekonomi. Globalisasi mengimplikasikan serangkaian perubahan yang rumit yang terjadi di berbagai bidang di luar ekonomi. Pada bidang teknologi, intensitas globalisasi ini dipacu oleh sistem komunikasi satelit global. Dengan teknologi ini dunia seolah menjadi "desa global" (*global village*).

Pengaruh teknologi komunikasi sedemikian luas, sampai menyentuh dimensi kehidupan sehari-hari, yakni mempengaruhi intimitas identitas personal. Dalam istilah Giddens, globalisasi bukan *'out there' phenomenon*, tapi *'in here' phenomenon*. Globalisasi juga telah menyentuh konteks tindakan lokal, meskipun tidak merusaknya; dan bahkan sebaliknya memunculkan bentuk-bentuk baru otonomi kultural. Tuntutan terhadap identitas kultural dan ekspresi diri adalah beberapa contoh dari pengaruh yang ditimbulkan oleh proses globalisasi.

---

[1] Pembagian yang sama dilakukan oleh Beck (1992) yang mensejajarkan antara modernisasi sederhana atau klasik dengan modernisasi tradisi dan modernisasi masyarakat industrial dengan modernisasi refleksif.

Kedua, sumber perubahan berikutnya adalah 'detradisionalisasi'. Konsep ini dapat membedakan antara proses-proses transformasi yang lebih lama dari perubahan-perubahan yang lebih intensif dalam beberapa dekade terakhir. Modernitas tentu saja selalu membuat dirinya sendiri melawan tradisi — ini adalah salah satu dari elemen Pencerahan. Sekalipun selama periode yang panjang, yang disebut oleh Beck (1994) sebagai 'simple modernization', modernitas dan tradisi berada dalam serangkaian simbiosis. Ilmu pengetahuan itu sendiri menjadi semacam tradisi, yakni suatu otoritas mapan untuk menjawab berbagai teka-teki masalah. Simbiosis antara modernitas dan tradisi menandai 'simple modernization' kurang lebih pada abad pertama dan separuh dari proses industrialisasi dan modernitas.

Dalam fase 'reflexive modernization', yang berakselerasi dalam beberapa dekade terakhir, status tradisi telah berubah. Dalam fase ini terjadi proses 'detradisionalisasi'. Namun, ini bukan berarti akhir dari tradisi. Lebih dari itu, dalam banyak keadaan, tradisi justru diperkuat dan secara aktif dipertahankan. Ini tampak dari gejala menguatnya 'fundamentalisme', yang dapat diartikan sebagai tradisi yang dipertahankan secara tradisional dalam menghadapi globalisasi.

'Detradisionalisasi' berkaitan erat dengan 'akhir alam' (*the end of nature*), dan malahan acapkali saling berjalin. 'Alam' menghilang dalam pengertian bahwa sejumlah aspek dari lingkungan dunia material tetap tidak terpengaruhi oleh intervensi manusia. Tradisi dan alam, sebagaimana mereka ada, digunakan sebagai 'landscapes' dari aktivitas manusia, dan terbawa serta olehnya kesesuaian tertentu dengan praktek-praktek gaya hidup. Ketika tradisi dan alam terpisah, serangkaian keputusan baru harus diambil dalam bidang yang sebelumnya tidak dapat diputuskan.

Sebagai contoh adalah dalam bidang reproduksi manusia. Suatu jenis reproduksi yang telah ada sebelumnya, yang tidak terbuka untuk dipengaruhi oleh keputusan manusia, baik dalam prinsip maupun prakteknya, kini telah dapat diperlunak. Untuk punya anak tidak perlu harus melalui kontak seksual, seks menjadi masalah pilihan, kontrasepsi menjadi lebih efektif, sehingga keputusan untuk punya anak menjadi sesuatu yang berbeda dari ketika urusan anak merupakan proses yang alami. 'Akhir dari alam' dalam hal reproduksi terkait erat dengan perubahan yang dibawa oleh 'detradisionalisasi'.

Ketiga, perubahan yang berkaitan dengan ekspansi refleksivitas sosial (*social reflexivity*). Perubahan ini tidak lepas dari globalisasi komunikasi. Refleksivitas bukan berarti kesadaran diri. Konsep ini lebih mengacu pada kondisi kehidupan dalam tata sosial yang telah di-'detradisionalisasi'-kan. Dalam tatanan tersebut, tiap orang harus menghadapi dan berhubungan dengan berbagai sumber informasi dan pengetahuan yang mencakup klaim-klaim pengetahuan yang terfragmentasi dan bertentangan. Setiap orang dalam kondisi ini harus tanggap terhadap kondisi kehidupannya.

Hidup dalam lingkungan sosial yang refleksif ini memang bisa membawa banyak keuntungan baru dan bentuk-bentuk otonomi yang meningkat, akan tetapi pada waktu yang sama, ia juga membawa masalah dan kekhawatiran baru. Sebagai ilustrasi adalah gejala makan yang tidak teratur dan anorexia di masyarakat barat. Fenomena ini relatif baru, mungkin sejak tiga puluh tahun yang lalu. Keduanya adalah patologi masyarakat di mana setiap orang berada pada kondisi diet, karena sebenarnya keragaman bahan makanan selalu tersedia bagi orang yang membutuhkan kapanpun. Diet tidak lagi alami - tidak terkait dengan musim lokal dan persediaan produksi lokal. Diet terkait erat dengan perawatan tubuh. Bagi banyak orang, terutama wanita muda, tekanan sosial untuk melakukannya dapat dianggap sebagai bentuk patologi dan memaksa.

Karakteristik Resiko

Dunia tempat kita tinggal sekarang, menurut Giddens (1996), lebih tidak menentu daripada dunia yang dialami oleh generasi sebelumnya. Sumber ketidakmenentuan itu pun telah berubah. Ketidakmenentuan pada era kini disebutnya sebagai "manufactured uncertainty" atau "manufactured risk" (MR). Menurut Giddens, menguatnya MR ini harus dilihat dalam konteks transisi yang terkait dengan modernitas secara menyeluruh. MR ini bersumber dari keterlibatan manusia dalam mencoba untuk mengubah alur sejarah dan menguasi alam. Dengan kata lain, MR bersumber dari usaha manusia untuk mengembangkan iptek dalam meningkatkan kekuatan kontrolnya atas sejarah dan alam.

Contoh kongkrit dari MR ini adalah debat mengenai isu pemanasan global (*global warming*), yang merupakan debat tentang "alam yang tidak lagi alami" (*nature is no longer nature*). Mayoritas ilmuwan percaya bahwa pemanasan global kini tengah berlangsung dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Sementara itu, ilmuwan lain mengatakan bahwa isu tersebut hanyalah mitos belaka. Di antaranya bahkan ada yang mengatakan bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah justru kebalikannya, yakni proses jangka panjang dari pendinginan global (*global cooling*). Ketidakmenentuan yang berasal dari hipotesa pemanasan global tidak turun dari alam yang tidak dapat dikuasai, melainkan dari intervensi manusia ke dalam alam, atau dari "*the end of nature*". Karena itu, kita tidak dapat sepenuhnya percaya apakah pemanasan global benar-benar sedang terjadi. Sikap yang paling baik barangkali menganggapnya sebagai masalah "seolah-olah" (*as if manner*), dan melakukan berbagai upaya solusi dari akibat-akibat yang dikenali.

MR ini harus dibedakan dengan *"external risk"* (ER). ER merujuk pada sumber ketidakmenentuan yang berasal dari alam atau sejarah yang tidak mampu dikuasai oleh manusia - yakni sejarah yang dihidupkan oleh tradisi-tradisi, kebiasaan, dan praktek-praktek yang bersifat "*taken for granted*". Bentuk kongkrit dari ER ini tampak jelas dari bencana alam. Malapetaka alam biasanya masih dapat diprediksi dengan akurasi tertentu dan

dampaknya pun dapat diperkirakan. Dampaknya biasanya bersifat jangka pendek dan dapat dikelola. Karena itu, bahaya yang berasal dari bencana alam ini dapat dimasukkan ke dalam parameter ER.

Berbeda dengan ER, MR memiliki ciri sebagai bahaya dalam skala besar, baik dalam artian area (tempat) maupun jangkauan waktu. Bahaya seperti ini telah ditunjukkan oleh bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang akibatnya menyebar secara tidak pasti ke masa depan. Berkaitan dengan reaksi terhadap keamanan reaktor nuklir, para ahli sebelumnya bisa saja mengatakan bahwa bahaya seperti ini tidak dapat terjadi *(it cannot happen)*, dan kini mengatakan bahwa bahaya itu tidak dapat terjadi di sini (*it cannot happen here*). Tapi bagi penduduk Chernobyl, bahaya tersebut benar-benar telah terjadi, bahkan jika sebelumnya mereka tahu akan bahaya itu. Apa yang riil dari bahaya itu adalah konsekuensi jangka panjangnya. Memang kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi nuklir telah dengan cepat dinormalisasi, dan dinyatakan aman setidaknya untuk beberapa bagian Eropa. Namun, siapa yang tahu, apakah benar-benar aman ketika dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang tidak memiliki preseden sejarah?

Berbeda dengan bahaya yang terjadi secara alamiah, akibat dari bahaya berskala besar, seperti bahaya Chernobyl tersebut, tidak dapat secara mudah dibatasi dalam pengertian waktu dan ruang atau tempat. Ketakutan atau trauma yang diakibatkan oleh bahaya seperti itu juga tidak mudah hilang. Dalam konteks MR, ketakutan seperti itu bahkan merupakan sesuatu yang intrinsik yang muncul sebagai *"genuine threats"*. Karena, apa yang riil dari bahaya seperti itu tidak dapat diketahui sebagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh ER. Bahaya berskala besar ini berada dalam situasi yang selalu *"liable"*, yang melibatkan faktor-faktor yang tidak diduga sebelumnya.

Contoh lain dari MR ini adalah bencana asap yang melanda kawasan negara-negara Asia Tenggara, sejak Agustus 1997[2] di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Bencana berskala luas ini timbul sebagai dampak dari tindakan manusia (terutama para pengusaha perkebunan dan pemegang HPH) yang melakukan pembersihan lahan (land clearing) secara ceroboh. Gejala alam El Nino yang menyebabkan kekeringan berkepanjangan telah menyebabkan kebakaran hutan yang telanjur meluas semakin sulit dikontrol dan dikendalikan. Kadar polusi asap yang ditimbulkan oleh kabakaran hutan yang teramat luas itupun telah melebihi ambang batas dan menyebabkan gangguan pada banyak aspek kehidupan, seperti transportasi, pendidikan, kegiatan perekonomian dan kesehatan makhluk hidup. Dampak yang paling terasakan dan diduga akan menimbulkan dampak ikutan yang panjang adalah dampak kesehatan. Asap tidak hanya menyebabkan makin parahnya derita para penderita sakit saluran pernapasan, namun juga menyebabkan gangguan sakit pada orang yang semula sehat. Para penderita sakit ini bisa jadi tidak hanya akan merasakan penderitaan saat ini

[2] Saat tulisan ini disusun, akhir Oktober 1997, kebakaran masih berlangsung di berbagai daerah di Kalimantan dan Sumatera, dan belum mampu dikendalikan.

saja, tapi juga di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu, dampak asap tidak hanya merentang luas secara spasial, tetapi juga bisa merentang jauh ke masa depan.

Dampak dari kebakaran atau pembakaran hutan juga akan menyeruak jauh ke masa depan dalam kaitan dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Kerusakan dan hilangnya jutaan hektar lahan hutan akan dengan sendirinya diikuti oleh musnahnya keanekaragaman hayati. Sejumlah tumbuhan langka yang terdapat di hutan Kalimantan mungkin telah musnah. Juga berbagai organisme hidup dan satwa langka lainnya seperti orang utan, akan makin berkurang populasinya, jika tidak malahan punah. Upaya-upaya pemulihan yang akan dilakukan kemudian tidak akan bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Kerugian yang diakibatkan karenanya tidak hanya menimpa generasi yang hidup sekarang, tetapi juga dan yang lebih penting lagi adalah generasi mendatang.

Ciri MR yang disebabkan oleh tindakan manusia untuk menguasai dan mengeksplotasi alam ini acapkali diabaikan oleh para aktivis gerakan lingkungan. Berbagai protes terhadap polusi dan kerusakan lingkungan, seperti tumpahan minyak, tanah yang terkontaminasi, dan lain-lain, masih didasarkan pada pemahaman mengenai ER tersebut. Dengan kata lain, masih dilihat sebagai sekedar masalah dampak samping (*side effect*). Karena dianggap sebagai dampak samping yang bersifat eksternal, maka resiko atau bahayanya diandaikan dapat dikontrol atau dimonitor. Sebagai contoh, dampak industri yang tingkat polusinya dapat dikontrol melalui penerapan batas ambang yang bisa diterima (*acceptable level*). Batas ambang yang bisa diterima hanyalah akurat untuk tempat dan waktu tertentu saja. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya diakibatkan oleh proses kimiawi yang terjadi sekarang pada bumi dan juga tubuh manusia tiga puluh tahun mendatang, atau beberapa generasi mendatang.

Menurut Giddens (1994), selama resiko masih ditempatkan sebagai ER, ilmu pengetahuan akan terus menawarkan rasa aman, bahkan kepastian, bagi individu dan juga para pemegang otoritas politik. Tapi MR memiliki konotasi lain. Ilmu pengetahuan, teknologi dan industri telah menimbulkan resiko berkonsekuensi tinggi (*high-consequnce risk*) yang tidak bisa dikontrol lagi oleh manusia. Resiko ini memiliki kategorinya sendiri, yakni dalam skalanya yang menyeluruh (*sheer scale*)[3]. Skala yang menyeluruh tersebut memberi kemungkinan bahaya pada siapapun, bahkan pada siapapun yang tampak tidak terpengaruhi.[4] Sebab, lebih dari ancaman yang sederhana, tidak ada kemungkinan terhindarkan dari bahaya tersebut.

---

[3] Dalam hal skala resiko ini terdapat pararelitas antara Giddens dan Beck (1993). Beck bahkan mengatakan bahwa masyarakat modern lanjut sekarang ini ditandai oleh distribusi resiko, untuk membedakan dari distribusi kekayaan. Karena alasan ini pula Beck menyebut masyarakat modern lanjut dengan istilah masyarakat resiko (*risk society*).

[4] Dalam rumusan yang agak berbeda, Beck (1995) mengatakan bahwa resiko atau *hazard* tidak dapat dibatasi secara spasial, temporer, dan sosial. Hazard juga melampui batas-batas negara bangsa, aliansi militer dan semua kelas sosial. Lihat, Ulrich Beck, *Ecological Politics in an Age of Risk*, Polity Press, 1995.

saja, tapi juga di waktu-waktu yang akan datang. Karena itu, dampak asap tidak hanya merentang luas secara spasial, tetapi juga bisa merentang jauh ke masa depan.

Dampak dari kebakaran atau pembakaran hutan juga akan menyeruak jauh ke masa depan dalam kaitan dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Kerusakan dan hilangnya jutaan hektar lahan hutan akan dengan sendirinya diikuti oleh musnahnya keanekaragaman hayati. Sejumlah tumbuhan langka yang terdapat di hutan Kalimantan mungkin telah musnah. Juga berbagai organisme hidup dan satwa langka lainnya seperti orang utan, akan makin berkurang populasinya, jika tidak malahan punah. Upaya-upaya pemulihan yang akan dilakukan kemudian tidak akan bisa mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Kerugian yang diakibatkan karenanya tidak hanya menimpa generasi yang hidup sekarang, tetapi juga dan yang lebih penting lagi adalah generasi mendatang.

Ciri MR yang disebabkan oleh tindakan manusia untuk menguasai dan mengeksplotasi alam ini acapkali diabaikan oleh para aktivis gerakan lingkungan. Berbagai protes terhadap polusi dan kerusakan lingkungan, seperti tumpahan minyak, tanah yang terkontaminasi, dan lain-lain, masih didasarkan pada pemahaman mengenai ER tersebut. Dengan kata lain, masih dilihat sebagai sekedar masalah dampak samping (*side effect*). Karena dianggap sebagai dampak samping yang bersifat eksternal, maka resiko atau bahayanya diandaikan dapat dikontrol atau dimonitor. Sebagai contoh, dampak industri yang tingkat polusinya dapat dikontrol melalui penerapan batas ambang yang bisa diterima (*acceptable level*). Batas ambang yang bisa diterima hanyalah akurat untuk tempat dan waktu tertentu saja. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya diakibatkan oleh proses kimiawi yang terjadi sekarang pada bumi dan juga tubuh manusia tiga puluh tahun mendatang, atau beberapa generasi mendatang.

Menurut Giddens (1994), selama resiko masih ditempatkan sebagai ER, ilmu pengetahuan akan terus menawarkan rasa aman, bahkan kepastian, bagi individu dan juga para pemegang otoritas politik. Tapi MR memiliki konotasi lain. Ilmu pengetahuan, teknologi dan industri telah menimbulkan resiko berkonsekuensi tinggi (*high-consequnce risk*) yang tidak bisa dikontrol lagi oleh manusia. Resiko ini memiliki kategorinya sendiri, yakni dalam skalanya yang menyeluruh (*sheer scale*)[3]. Skala yang menyeluruh tersebut memberi kemungkinan bahaya pada siapapun, bahkan pada siapapun yang tampak tidak terpengaruhi.[4] Sebab, lebih dari ancaman yang sederhana, tidak ada kemungkinan terhindarkan dari bahaya tersebut.

---

[3] Dalam hal skala resiko ini terdapat pararelitas antara Giddens dan Beck (1993). Beck bahkan mengatakan bahwa masyarakat modern lanjut sekarang ini ditandai oleh distribusi resiko, untuk membedakan dari distribusi kekayaan. Karena alasan ini pula Beck menyebut masyarakat modern lanjut dengan istilah masyarakat resiko (*risk society*).

[4] Dalam rumusan yang agak berbeda, Beck (1995) mengatakan bahwa resiko atau *hazard* tidak dapat dibatasi secara spasial, temporer, dan sosial. Hazard juga melampui batas-batas negara bangsa, aliansi militer dan semua kelas sosial. Lihat, Ulrich Beck, *Ecological Politics in an Age of Risk*, Polity Press, 1995.

Lebih dari bahaya apapun, resiko seperti ini sukar diatasi (*refractory*) menurut prosedur umum dalam ilmu pengetahuan. Diagnosisnya memiliki elemen yang menentang kenyataan, dan karenanya pengobatan apapun yang dilembagakan sangat sulit untuk melawannya. Meskipun kita merasa bahwa obat tersebut bekerja, kita tidak pernah tahu, apakah klaim diagnostik yang diberikan adalah benar. Kembali pada contoh mengenai isu pemanasan global, tindakan yang paling mungkin adalah tindakan pencegahan dengan pertimbangan bahwa pemanasan global tengah berlangsung dan memiliki akibat yang berbahaya. Bahkan jika tindakan seperti itu dilakukan, akan mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah hanya ketakutan lain dan bagian dari upaya yang ditebarkan untuk sesuatu yang tidak jelas.

Sumber-sumber 'Manufactured Risk'

Menurut Giddens (1994), terdapat empat konteks utama di mana resiko konsekuensi tinggi tersebut muncul. Masing-masing berkaitan dengan dimensi kelembagaan modernitas.

Pertama, resiko yang berkaitan dengan dampak pembangunan sosial modern pada ekosistem dunia. Hubungan manusia dengan lingkungan telah menjadi problematik dalam beberapa cara. Sumber-sumber material yang diperlukan untuk melangsungkan kehidupan manusia, dan khususnya cara hidup bagian-bagian dunia yang telah mengalami industrialisasi, tampak terancam baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. Laporan dari *Club of Rome* telah menunjukkan ancaman terhadap sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Kebakaran hutan yang sangat luas di Indonesia merupakan contoh paling nyata dan mutakhir dari rusak dan hilangnya kekayaan sumberdaya alam tersebut. Kapasitas bumi untuk menampung sampah atau limbah dari berbagai aktivitas industrial juga makin dirisaukan oleh para pembela ekologi. Sejumlah bahaya ekologis yang kini dapat diidentifikasi, seperti dampak pemanasan global dari efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, kerusakan hutan tropis, kekeringan, dan peracunan terhadap air dan udara, akan terus menebarkan resiko kepada para penghuni bumi.

Kedua, resiko yang muncul dalam kaitan dengan perkembangan kemiskinan pada skala besar, atau bisa disebut *'halaqoust of poverty'*. Tidak kurang dari 20% penduduk dunia, terutama di negara-negara berkembang, kini hidup dalam kemiskinan absolut, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Banyak di antara mereka juga mengalami kemiskinan relatif, ketika standar hidup mereka berada dalam kondisi yang lebih rendah karena proses-proses marginalisasi. Pada titik ini, banyak orang akan selalu berhadapan dengan masalah ketidakpastian ekonomi dan sosial karena kondisi marginal yang mereka alami.

Resiko yang ketiga timbul dari keberadaan yang meluas dari senjata-senjata perusak massal, bersamaan dengan situasi lain yang dibayangi oleh kekerasan kolektif. Akhir perang

dingin agaknya tidak cukup memberi pelajaran bagi manusia untuk menghentikan produksi senjata sebagai sumber kerusakan bumi. Kini, tidak kurang dari lima belas negara memiliki senjata nuklir. Beberapa negara, baik negara maju maupun negara berkembang juga masih mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan energi bagi upaya industrialisasi, meskipun teknologi itu telah dikritik sebagai boros dan membahayakan ekologi. Kekuatan perusak dan polusi radioaktif yang dimiliki senjata dan reaktor nuklir tersebut, sebagaimana telah ditunjukkan oleh serangkaian musibah nuklir di Amerika dan Jepang, masih belum mampu memaksa manusia untuk menjauhi penggunaannya.

Resiko juga masih membayang sebagai akibat dari penggunaan sarana-sarana kekerasan, sekalipun konfrontasi di antara dua negara adidaya telah usai. Meskipun tata dunia baru muncul, masalah kekerasan tersebut tetap saja menyeruak ke permukaan. Ini berasal bukan hanya karena akumulasi perangkat keras militer, tetapi juga bersumber dari memburuknya ketegangan lokal di berbagai belahan dunia, yang terkait dengan masalah nasionalisme, agama dan etnis.

Sumber keempat dari krisis global yang bisa menimbulkan meningkatnya MR adalah represi berskala luas terhadap hak-hak demokratis dan ketidakmampuan dan keengganan sejumlah pemegang otoritas untuk mendorong pengembangan potensi kreatif-manusiawi para warga masyarakat. Militerisme memang telah menurun, meskipun pada tahun 1993 masih ada lebih dari lima puluh penguasa militer di berbagai belahan dunia. Banyak orang harus menderita bukan saja karena kemiskinan dan kelangkaan sumberdaya alam, melainkan karena para pemegang kekuasaan yang korup, egois dan otoriter. Kelaparan dan epidemi penyakit, sebagaimana berlangsung di Afrika, acapkali muncul bukan karena kelangkaan sumberdaya alam dan tiadanya sarana kesehatan, melainkan karena para pemegang kekuasaan yang lebih mementingkan kursi kekuasaan itu sendiri daripada mensejahterakan warga masyarakat. Banyak orang dibunuh dan dipenjarakan, sebagaimana terjadi di Bosnia, bukan karena mereka secara hukum bersalah, melainkan karena kesadaran politik, lebel agama, ras dan etnis tertentu.

Secara ringkas, keempat sumber dari berbagai resiko dan ketidakpastian diatas berkaitan dengan dimensi kelembagaan yang berbeda dari peradaban modern, sebagaimana terlihat pada diagram berikut.

(Kapitalisme) Polarisasi ekonomi	Ancaman-ancaman Ekologis (Industrialisme)
(Surveillance) Penolakan hak-hak demokratis	Ancaman Perang berskala luas (Sarana kekerasan)

Perluasan global modernitas, sebagaimana dikemukakan oleh kalangan 'kiri' maupun 'kanan' adalah didorong oleh dinamika perusahaan-perusahaan kapitalis (kapitalisme), yang pada satu sisi membawa kelimpahruahan ekonomi bagi suatu kelompok masyarakat, tetapi pada sisi lain membawa serta marginalisasi ekonomi kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Namun demikian, tidak seluruh bagian dunia benar-benar kapitalistik, karena ada dimensi-dimensi struktur lain yang juga berjalan dinamis. Dimensi-dimensi itu mencakup industrialisme, sarana kekerasan, dan surveillance. Industrialisme sebagai model produksi yang telah mengubah hubungan manusia dengan alam material dan mengancam kelangsungan ekologis. Kekuatan militer dan sarana kekerasan yang membayangi ancaman perang dengan segala derita dan ketakutan yang diakibatkan. Sedangkan penolakan terhadap hak-hak demokrasi dan hak asasi manusia, melalui kontrol informasi dan kontrol administratif lainnya (*surveillance*), tidak hanya membelenggu aktualisasi potensi-potensi kreatif manusia dan menebarkan ketakutan untuk berekspresi dan berkarya, melainkan juga melemahkan daya tawar menawar ekonomi dan politik warga masyarakat .

Solusi 'Manufactured Risk' : Politik Radikal (*Radical Politics*)

Giddens menawarkan solusi terhadap dominannya MR dengan konsep tentang politik radikal. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa skala dari MR bersifat global dan sumber-sumber resiko bisa ditemukan dalam dimensi-dimensi kelembagaan dari modernitas[5], atau mungkin bisa disebut sebagai 'anak haram' dari modernitas itu sendiri. Menurutnya, model politik yang telah berkembang seperti konservatisme, sosialisme, dan neoliberalisme sudah tidak lagi memadai, sehingga diperlukan model politik lain yang bersesuaian dengan karakteristik dan sumber resiko (MR), yakni politik radikal, sebuah konsep yang melampaui radikalitas yang dimiliki oleh pemikiran 'kiri' dan 'kanan' (*beyond left and right*).

Politik radikal sebenarnya bukan ide baru. Ide ini telah melekat dalam sosialisme. Radikalisme berarti memutuskan diri dari masa lalu melalui revolusi. Bagi sosialisme, revolusi seringkali dianggap sebagai satu-satunya jalan. Menurut Giddens, radikalisme tidak hanya berarti membawa perubahan tetapi juga mengontrol perubahan sehingga mendorong sejarah ke depan. Proyek inilah yang menurut Giddens kini nampak hilang dan telah tertutup. Serangkaian krisis dan ketidakpastian yang muncul dari proses modernisasi yang refleksif, memberikan dasar argumen yang kuat untuk merumuskan kembali politik radikal.

---

[5] Dalam ungkapan yang lebih provokatif, Beck (1995) mengatakan bahwa modernisasi telah berkembang menjadi barbarisme (*modernized barbarism*). Menurutnya, hal ini dipicu oleh perkembangan dalam teknologi gen manusia. Para biolog dan dokter telah memasuki era baru (*eugenic age*) dan tengah terkurung dalam 'normality', yang melampaui batas-batas yang dapat diterima. Bahkan ia menyebut perkembangan ini sebagai mimpi buruk , seolah-olah teror Nazi kembali muncul lagi dalam bentuk yang lain, *"madness into normality"*.

Menurutnya, krisis ekologi global yang kini telah meningkatkan derajat ketidakpastian harus direspon secara berbeda, yakni dengan merumuskan kembali politik radikal. Krisis global dan berbagai filsafat dan gerakan yang meresponnya harus ditempatkan sebagai ekspresi dari modernitas - yang telah mengglobal dan malahan kembali menyerang dirinya sendiri - dalam menghadapi batas-batasnya sendiri.

Giddens merumuskan politik radikal ke dalam empat dimensi utama sebagai respon dan solusi terhadap empat dimensi modernitas yang menjadi sumber krisis dan ketidakpastian (MR), dan sekaligus membangun *utopian realism* sebagaimana tampak dari diagram berikut.

(Capitalism) Post-scarcity economy	Humanized nature (Industrialisme)
(Surveillance) Dialogic Democracy	Negotiated power (Means of Violence)

Solusi yang pertama adalah melalui ide tentang ekonomi post-scarcity. Pengertian ekonomi *post-scarcity* biasanya dikaitkan dengan ide Marxism. Bagi kalangan Marxist ide tentang masyarakat post-scarcity merupakan visi tentang suatu era kemakmuran universal, di mana kelangkaan akan secara efektif menghilang. Ide tersebut merupakan ide yang utopia. Namun, menurut Giddens, ide tersebut tidak lagi bersifat utopia. Menurutnya, ide tersebut merujuk pada situasi atau lebih tepat kompleks situasi di mana pertumbuhan ekonomi tidak lagi penting.

Ide *post-scarcity* bukan berarti tiadanya kelangkaan, karena akan selalu ada barang-barang 'positional'. Tendensi ke arah ekonomi *post-scarcity* muncul ketika proses akumulasi secara luas dilihat mengancam atau merusak cara-cara hidup yang bermakna. Akumulasi menjadi bersifat *counterproductive* dalam dirinya sendiri, yakni ketika terjadi *overdevelopment* yang mengarah pada akibat-akibat ekonomi, sosial dan kultural; dan ketika dalam domain politik kehidupan individu-individu atau kelompok menempuh gaya hidup yang membatasi atau secara aktif melawan maksimalisasi peruntungan ekonomi.

Dalam konteks ide tentang masyarakat *post-scarcity* tersebut, Giddens mengajukan tawaran untuk memikirkan kembali format *'welfare state'*. Konsep negara kesejahteraan yang dirancang untuk menghadapi krisis yang disebabkan oleh ER tidak lagi mencukupi ketika yang lebih terjadi kini adalah krisis yang ditimbulkan oleh MR.

Contoh yang jelas terlihat pada isu kesehatan dan sakit. Sistem perawatan kesehatan medis di *'welfare state'* didasarkan pada asumsi bahwa jatuh sakit adalah sesuatu yang sederhana terjadi pada orang dalam kondisi tertentu. Dalam dunia yang lebih aktif ditandai oleh gaya hidup yang terorganisir, di mana tubuh tidak lagi sebagaimana adanya (*given*), asumsi ini tidak bisa dipegang lagi. Keadaan sehat cenderung kuat dipengaruhi oleh

keputusan gaya hidup yang diambil dan keadaan lingkungan yang dapat dikuasai. Sistem perawatan kesehatan menjadi goyah bukan disebabkan oleh eskalasi harga dari pengobatan medis yang standard, melainkan lebih karena ia masih bergantung banyak pada asumsi sakit sebagai ER.

Solusi yang kedua adalah humanisasi alam atau ekologi. Dalam pandangan Giddens, upaya ini akan melampaui sekadar upaya-upaya konservasi dan preservasi sumberdaya alam. Menurutnya, isu ekologi harus didekati dalam konteks 'detradisionalisasi', karena alam telah 'berakhir' dalam cara yang pararel dengan tradisi, sehingga kini banyak orang merasa khawatir apakah alam masih memiliki peran bagi mereka.

Menghadapi masalah humanisasi alam berarti mulai dari keberadaan *'plastic nature'*, atau alam di dalam era tata post-tradisional. Keputusan-keputusan tentang apa yang harus dilestarikan atau diperbarui amat jarang dapat diputuskan dengan mengacu pada apa yang ada secara independen dari manusia. Pertanyaan tentang penipisan sumberdaya dan kerusakan lingkungan acapkali dapat dianalisa dalam pengertian seberapa jauh keduanya menyimpang dari siklus regenerasi yang alami. Konservasi harus memecahkan masalah bagaimana mengakomodasi dan memaknai masa lalu dengan menghargai masa depan.

Dalam konteks dunia yang mengalami 'detradisionalisasi', keputusan-keputusan baru akan harus diambil, yang mungkin sebelumnya tidak diperkirakan. Ini mengandaikan suatu upaya mobilisasi keputusan-keputusan hidup (*life decisions*). Dalam kaitan ini pergeseran dari politik emansipatoris (*emancipatory politics*), sebagaimana tampak dari teori-teori dan praktek politik liberal, ke politik kehidupan (*life politics*) menjadi amat penting.

Politik emansipatoris berkaitan dengan masalah bebas dari tekanan dan represi, dengan cara melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Politik emansipatoris adalah politik tentang kesempatan hidup (*life chance*), dan karenanya yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan otonomi tindakan. Dalam konteks pergeseran tersebut, politik emansipatoris, bersama-sama dengan politik kehidupan, akan tetap penting dalam progam politik radikal.

Politik kehidupan adalah bukan politik tentang kesempatan hidup, melainkan politik tentang gaya hidup (*life style*). Politik kehidupan berkaitan dengan perjuangan tentang bagaimana kita (sebagai individu dan humanitas kolektif) akan hidup di dalam dunia di mana apa yang sebelumnya telah jelas (*fix*) baik karena alam maupun tradisi, kini menjadi subjek dari proses-proses pengambilan keputusan manusia. Dengan kata lain, politik kehidupan berkaitan dengan persoalan bagaimana manusia seharusnya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada lebih banyak pilihan daripada yang mereka miliki sebelumnya. Sebagai contoh, isu-isu ekologis tidak semata-mata hanya berkaitan dengan masalah lingkungan. Isu-isu ekologis lebih merupakan tanda dan juga ekspresi dari sentralitas masalah kehidupan politis, lebih dari sekedar persoalan yang ditimbulkan oleh

kapitalisme. Isu-isu ekologis hadir dan menuntut jawaban tentang apa yang harus kita hadapi ketika kemajuan (*progress*) berkembang ke arah dua sisi yang berseberangan, yakni ketika kita memiliki tanggung jawab baru terhadap generasi mendatang, dan ketika terdapat dilema etis bahwa mekanisme pertumbuhan ekonomi yang konstan, di satu sisi akan membawa kita pada kemakmuran, sementara di sisi lain akan menimbulkan represi terhadap manusia dan juga alam.

Politik kehidupan akan melibatkan suatu proses tawar menawar, yang oleh Giddens (1996) disebut dengan 'tawar menawar gaya hidup' (*life style bargaining*). Ini melibatkan penciptaan tukar menukar sumberdaya yang didasarkan atas koalisi politis-kehidupan di antara berbagai kelompok yang berbeda. Dengan adanya mekanisme tawar-menawar gaya hidup tersebut, Giddens merasa optimis bahwa berbagai krisis global dan ketidakpastian yang meningkat akan dapat dipecahkan.

Solusi yang ketiga berkaitan dengan ancaman dan resiko dari perang berskala luas, yang kini tengah mengancam lingkungan secara dahsyat melalui berbagai bentuk teknologi mutakhir. Kaitan antara industrialisasi dengan perang agaknya sulit dielakkan. Teknologi senjata, seperti senjata kimia dan nuklir mampu merusak dan mencemari seluruh permukaan bumi. Disamping melalui senjata perang, bentuk kekerasan bisa juga muncul dari meningkatnya berbagai ketegangan sosial dalam alur nasionalisme, agama, dan etnis.

Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan tidak selalu bersumber dari kekuatan militer atau perang. Menurut Giddens, kini terdapat hubungan baru antara sarana-sarana kekerasan dan penggunaan sarana komunikasi. Media komunikasi acapkali juga berfungsi sebagai penyalur sarana-sarana kekerasan, seperti pemaksaan ide, hegemoni wacana, dan lain-lain. Hubungan keduanya bisa berlaku tidak hanya dalam lingkup kekerasan domestik, melainkan juga dalam lingkup global.

Pada titik inilah, makna tentang kekuasaan yang harus dinegosiasikan (*negotiated power*) perlu dikedepankan. Kekuasaan tidak bisa dibiarkan memusat dan mengabaikan kepentingan banyak orang. Kekuasaan harus merupakan produk dari suatu negosiasi di antara berbagai kelompok kepentingan masyarakat. Ini mengandaikan bahwa harus ada pengakuan terhadap hak dan kepentingan kelompok masyarakat untuk secara egaliter melakukan tawar menawar politik. Pluralitas kepentingan bukannya harus ditundukkan melalui penggunaan sarana-sarana kekerasan, tetapi sebaliknya harus dikelola melalui proses negosiasi politik.

Upaya ini akan berkaitan erat dengan upaya keempat, yakni upaya yang berkaitan dengan ide utopia tentang suatu tata sosial yang bebas dari kekerasan. Kekerasan harus diredusir sampai ambang yang minimal melalui penghargaan terhadap hak-hak individu untuk bisa mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya. Bagi Giddens ini berarti proses demokratisasi yang lebih radikal. Dalam konteks tatanan modernisasi refleksif, Giddens menekankan pada demokrasi dialogis (*dialogic democracy*). Pengertian demokrasi

yang konvensional yang mencakup dua dimensi, yakni sebagai wahana untuk representasi kepentingan dan sebagai cara menciptakan arena publik untuk memecahkan dan mengelola masalah melalui dialog, diandaikan tidak lagi mencukupi. Arena politik formal seperti itu, dalam tatanan sosial yang refleksif, akan makin dipertanyakan atau diabaikan oleh masyarakat. Karena itu, demokrasi perlu diperluas sehingga bisa memfasilitasi suatu proses yang disebut sebagai *"the democratizing of democracy"*.

Perluasan proses tersebut menuntut reformasi baik di dalam arena politik formal maupun di dalam area kehidupan personal. Dalam arena politik formal-negara, transparansi pemerintah yang lebih besar akan semakin diperlukan. Demokrasi yang dialogis akan makin diperlukan dalam area kehidupan personal, seperti dalam hubungan orang tua dengan anak, hubungan seksual, hubungan pertemanan, dan lain-lain. Dalam konteks inilah Giddens menawarkan konsep "demokrasi emosi" (*democracy of emotions*) yang menekankan hubungan-hubungan personal yang didasarkan pada kepercayaan yang aktif (*active trust*) melalui diskusi dan pertukaran pandangan, daripada melalui kekuasaan yang sewenang-wenang. Perluasan praktek demokrasi emosi ini akan memiliki implikasi pada perkembangan demokrasi dalam arena politik formal atau publik.

Demokrasi dialogis juga dapat digerakkan melalui aktivitas kelompok-kelompok swadaya dan gerakan-gerakan sosial. Dalam masyarakat kontemporer banyak anggota masyarakat yang akan lebih tertarik dalam aktivitas seperti itu daripada menjadi anggota partai politik. Melalui organisasi dan aktivitas tersebut, masyarakat dapat membuka ruang untuk dialog publik dalam kaitan isu tertentu. Mereka juga dapat masuk ke dalam aspek-aspek domain diskursif dari tatanan sosial yang sebelumnya tidak pernah didiskusikan.

Penutup

Apa yang dipaparkan di atas hanyalah sketsa sangat kasar dari pemikiran Giddens mengenai perkembangan mutakhir dari dunia yang makin lanjut, yang ditandai oleh perkembangan iptek dan intervensi manusia yang terlalu jauh ke dalam proses-proses alam. Konteks perkembangan sosial mutakhir sekarang, telah melahirkan karakter dan tingkat ketidakpastian atau resiko yang distingtif. Resiko dan ketidakpastian lebih merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri daripada merupakan proses alamiah, sehingga disebut sebagai *manufactured risk* atau *manufactured uncertainty*. Bahkan kini proses-proses yang diandaikan berifat alami, sesungguhnya tidak lagi alami. Kehidupan kita sekarang, menurut Giddens, tidak lagi alami. Kita tengah hidup dalam alam yang palsu (*plastic nature*). Dalam dunia yang telah kehilangan 'tradisi' dan 'alam' seperti itu, manusia dihadapkan pada ancaman berskala luas yang bisa mengena pada siapapun dan sewaktu-waktu bisa menghampiri dan menjadi malapetaka.

Sumber dari segala resiko dan ketidakpastian tersebut, menurut Giddens berasal dari empat cacat kelembagaan dari modernitas, yakni kapitalisme yang menimbulkan polarisasi ekonomi, ancaman-ancaman ekologis, penolakan hak-hak demokratis, dan ancaman perang berskala luas. Karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Giddens, berupaya mereformasi secara radikal keempat dimensi kelembagaan modernisasi, melalui konsep yang ia sebut politik radikal. Politik radikal merupakan reformasi dari empat cacat modernisasi di atas, yang mencakup aplikasi ekonomi *post-scarcity*, humanisasi alam, kekuasaan yang dinegosiasikan dan demokrasi dialogis.

Tawaran solusinya dengan mereformulasi politik radikal, bukanlah ide yang utopis. Rumusan politik radikal nampak sangat realistik, jika dikaitkan dengan sumber-sumber darimana resiko dan ketidakpastian itu muncul. Meskipun ide-ide tersebut tidak mudah dilakukan pada dataran praksis. Sekalipun demikian, bukan tidak mungkin jika ide mengenai politik radikal tersebut dapat diturunkan ke dalam agenda-agenda aksi baru bagi para aktor dan agen (*agency*) transformasi sosial, dari organisasi-organisasi negara, aktor-aktor gerakan sosial seperti kalangan feminis, aktivis lingkungan, partai politik dan kelompok-kelompok sosial swadaya lainnya, hingga aktor-aktor individual, untuk merumuskan kembali bagaimana kita akan menjalani kehidupan di masa datang (*How shall we live?).*

Daftar Pustaka

Beck, Ulrich, 1993, *Risk Society, Toward a New Modernity*, London: Sage Publication.

_____, 1995, *Ecological Politics in an Age of Risk*, Cambridge: Polity Press.

_____, Anthony Giddens dan Scott Lash, 1994, *Reflexive Modernization*, Cambridge: Polity Press.

Dickson, David, 1974, *The Politics of Alternative Technology*, New York: Universe Books.

Giddens, Anthony, 1994, *Beyond Left and Right, The Future of Radical Politics*, Cambridge: Polity Press.

_____, 1996, "Affluence, Poverty and the Idea of a Post-Scarcity Society", dalam Jurnal *Development and Change*, Vol, 27, No. 2, April 1996.

Habermas, Jurgen, 1990, *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES.

Horkheimer, Max., dan T.W. Adorno, 1972, *Dialectic of Enlightenment*, New York: Seabury Press.

Giddens, Anthony, 1994, *Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics*, Cambridge: Polity Press.

_____, 1996, "Affluence, Poverty and the Idea of a Post-Scarcity Society", dalam Jurnal *Development and Change*, Vol, 27, No. 2, April 1996.

Habermas, Jurgen, 1990, *Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi*, Jakarta: LP3ES.

Horkheimer, Max., dan T.W. Adorno, 1972, *Dialectic of Enlightenment*, New York: Seabury Press.